



Artikel

Studi Kualitatif tentang Dinamika dan Tantangan Pengelolaan Aset di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

Yasri Pasapan^{1✉}, Arlin Adam², Andi Alim³

^{1,2,3}Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Palopo

Article History

Submit 17 Juni 2025

Revised 19 Juni 2025

Accepted 13 Agustus 2025

Kata kunci

Analisis tematik;
Aset kesehatan;
Pengelolaan;
Strategi kebijakan;
Tantangan teknis

Abstrak

Pengelolaan aset daerah merupakan komponen vital dalam mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2024, masih ditemukan kelemahan signifikan dalam inventarisasi dan pencatatan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika, tantangan, dan strategi pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti kepala dinas, pengelola aset, kepala puskesmas, dan petugas teknis. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan aset menghadapi kendala teknis, kelemahan koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan utama antara lain belum tersusunnya SOP teknis yang baku, rendahnya kapasitas SDM, serta minimnya pembaruan data aset. Strategi yang telah diterapkan mencakup pembentukan tim inventarisasi dan dukungan regulasi melalui Surat Keputusan Bupati. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengelola aset, penyusunan SOP khusus aset kesehatan, dan pengembangan sistem informasi aset yang terintegrasi dan transparan. Upaya tersebut penting untuk memastikan pengelolaan aset yang optimal dalam mendukung layanan kesehatan di daerah pegunungan.

Abstract

Regional asset management is a vital component in supporting the efficiency and quality of public services, particularly in the health sector. According to the 2024 Audit Report by the Audit Board of Indonesia (BPK), significant weaknesses remain in the inventory and documentation of regional assets. This study aims to explore the dynamics, challenges, and strategies of asset management within the Health Office of North Toraja Regency. A qualitative approach with a case study design was employed, collecting data through in-depth interviews with key informants, including the head of the office, asset managers, heads of community health centers, and technical staff. Thematic analysis was applied through data reduction, categorization, and conclusion drawing. The results reveal that asset management faces challenges related to technical aspects, coordination mechanisms, and human resources. Key obstacles include the absence of standardized technical SOPs, limited staff capacity, and infrequent data updates. Strategies implemented include the formation of an inventory team and the issuance of a regulatory decree by the Regent. The study recommends strengthening the capacity of asset managers, developing specific SOPs for health assets, and establishing a more integrated and transparent asset information system. These efforts are essential to ensure optimal asset management that supports quality health services in mountainous regions.

Keywords

Thematic analysis;
Health assets;
Management;
Policy strategies;
Technical challenges

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Di sektor kesehatan, keberadaan aset seperti bangunan fasilitas layanan, alat kesehatan, kendaraan operasional, dan perlengkapan lainnya sangat menentukan kontinuitas dan mutu pelayanan kepada

masyarakat. Tanpa sistem inventarisasi yang akurat dan pemeliharaan yang terjadwal, aset rawan mengalami kerusakan atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, yang berpotensi menghambat akses layanan kesehatan dan merugikan masyarakat luas ([Mardiasmo, 2021](#)).

Urgensi pengelolaan aset telah ditegaskan melalui berbagai regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, yang diperbarui dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan aset yang menyeluruh mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Namun, di lapangan banyak daerah menghadapi tantangan dalam implementasinya ([Kementerian Dalam Negeri, 2016](#)).

Laporan BPK menunjukkan masih tingginya kesalahan dalam pencatatan aset tetap di berbagai pemerintah daerah, mulai dari nilai, lokasi, hingga status kepemilikan. Bahkan, ditemukan aset yang hanya tercatat secara administratif namun tidak dapat dilacak keberadaannya secara fisik. Hal ini memperbesar risiko kehilangan aset, inefisiensi anggaran, dan potensi kerugian negara ([BPK, 2025](#)). Kabupaten Toraja Utara, sebagai daerah pegunungan dengan kondisi geografis yang menantang, menghadapi kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan aset, khususnya di sektor kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai OPD pelaksana pelayanan kesehatan bergantung pada kelayakan dan ketersediaan aset untuk menjangkau desa-desa terpencil. Meskipun kabupaten ini memperoleh opini WTP selama lima tahun berturut-turut, BPK masih mencatat perlunya penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.

Di lapangan, tantangan tidak hanya bersifat struktural, seperti irisan kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BKAD, tetapi juga teknis dan administratif. Masalah seperti pencatatan manual oleh puskesmas, keterbatasan akses internet untuk SIMDA-BMD atau SIPD, kurangnya pelatihan teknis, hingga beban kerja ganda pegawai menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan pengelolaan aset yang ideal ([Tangdilassu et al., 2023](#)).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif administratif belum cukup untuk memahami akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi adaptif, dan dinamika pengelolaan aset secara lebih mendalam. Penelitian ini akan menggunakan wawancara dan observasi untuk menggali praktik sehari-hari para pelaksana teknis, misalnya strategi informal seperti menitipkan alat di

pustu atau membentuk grup WhatsApp lintas unit untuk sinkronisasi inventaris (Creswell, 2015).

Lebih jauh, studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset, seperti budaya organisasi, kapasitas SDM, dinamika regulasi, kondisi geografis, dan dukungan teknologi. Fokus geografis di wilayah pegunungan yang relatif belum banyak diteliti memberikan kontribusi orisinal (*novelty*) bagi pengembangan ilmu manajemen aset sektor publik. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur akademik dalam bidang manajemen aset kesehatan. Secara praktis, hasil studi diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif, seperti penyusunan SOP digital serah-terima aset, pembentukan unit pelatihan internal, hingga perencanaan ulang tata ruang dan logistik aset. Temuan ini juga relevan sebagai landasan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian, studi ini memiliki relevansi tinggi dalam mendukung upaya perbaikan sistem pengelolaan aset daerah yang kontekstual dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil seperti Kabupaten Toraja Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif eksploratif untuk mengkaji dinamika dan tantangan pengelolaan aset daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena dari perspektif pelaku di lapangan, terutama dalam konteks pengelolaan barang milik daerah (Creswell, 2015; Moleong, 2019).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Kantor Dinas Kesehatan dan beberapa puskesmas di bawah koordinasinya, dengan pertimbangan relevansi langsung terhadap siklus pengelolaan aset daerah (Sugiyono, 2019). Informan dipilih secara purposive meliputi Kepala Dinas, pengelola aset, kepala puskesmas, petugas teknis pemeliharaan, pengurus barang, dan staf administrasi. Jumlah informan disesuaikan hingga data mencapai saturasi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bantuan perekam suara digital untuk memastikan akurasi transkripsi. Observasi diarahkan pada proses nyata di lapangan, seperti

pencatatan aset dan penggunaan sistem SIMDA BMD. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen resmi seperti laporan aset, peraturan, dan SK pengelolaan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yang melibatkan proses transkripsi, reduksi data, pengkodean, identifikasi tema utama, dan interpretasi. Proses ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data dan didukung oleh perangkat lunak NVivo 12 untuk membantu pengorganisasian data dan eksplorasi tema.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini mengacu pada empat kriteria validitas Lincoln & Guba, (1985) yaitu kredibilitas (dengan triangulasi teknik dan konfirmasi informan), transferabilitas (melalui deskripsi kontekstual), dependabilitas (dengan dokumentasi sistematis), dan konfirmabilitas (penyajian data yang objektif dan dapat ditelusuri). Prinsip etika penelitian diterapkan secara ketat, antara lain melalui informed consent tertulis, jaminan kerahasiaan identitas informan, serta hak partisipan untuk menarik diri kapan saja. Seluruh data digunakan semata-mata untuk tujuan akademik (Beauchamp & Childress, 2001).

HASIL PENELITIAN

Pemahaman Struktural terhadap Pengelolaan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang terintegrasi, mulai dari pengadaan hingga pemanfaatan aset di puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar. Proses ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai bagian penting dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan.

Informan menjelaskan bahwa pengadaan aset dilakukan oleh instansi terkait dan selanjutnya didistribusikan ke puskesmas sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan.

"...pengelolaan aset daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dimulai dari proses pengadaan barang oleh instansi, yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian ke puskesmas-puskesmas..." (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, 02/06/2025).

Pemahaman struktural ini menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset saling berkaitan. Ketepatan dalam proses pengadaan dan distribusi aset berpengaruh langsung terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas.

Beban Ganda dan Kompleksitas Tanggung Jawab

Tanggung jawab pengelolaan aset mencakup seluruh siklus hidup aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Informan menunjukkan bahwa desentralisasi penggunaan aset harus diimbangi dengan sentralisasi pertanggungjawaban.

"...seluruh aset, termasuk bangunan, kendaraan roda empat dan roda dua, serta alat kesehatan (ALKES) yang ada di puskesmas, merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan..." (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, 02/06/2025).

Selain itu, beberapa petugas juga merangkap tugas program kesehatan masyarakat, menimbulkan beban ganda yang menurunkan efektivitas tugas.

"...pengelola aset saat ini juga memiliki tugas utama sebagai pemegang program..." (Pengelola Aset Daerah, 02/06/2025).

Sistem Prosedur dan Digitalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Proses pengadaan aset diawali dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh masing-masing unit kerja, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai dasar penganggaran.

Pelaksanaan pengadaan aset dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah aset diterima, dilakukan proses pencatatan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai bagian dari sistem administrasi aset. Selanjutnya, aset yang telah didistribusikan ke puskesmas menjadi tanggung jawab unit penerima dalam hal penggunaan dan pemeliharaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

"...pengadaan aset dilakukan oleh PPK atau ULP, kemudian dicatat dalam KIB, dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab puskesmas sebagai unit pengguna..." (PPK Dinas Kesehatan, 02/06/2025)

Dalam aspek digitalisasi, Dinas Kesehatan telah memanfaatkan aplikasi SIMDA Barang sebagai sistem informasi utama dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah. Penggunaan aplikasi ini dinilai memberikan kemudahan dan efisiensi, khususnya dalam proses input data

aset serta penyusunan laporan secara terintegrasi antar unit kerja. Salah satu informan menyatakan bahwa:

"...SIMDA Barang mempercepat proses input data aset dan memudahkan pelaporan antar unit secara real time..." (Staf Administrasi, 02/06/2025)

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi sistem digital tersebut. Kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia, terutama di tingkat puskesmas, yang belum seluruhnya memiliki kemampuan optimal dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Barang. Selain itu, masih ditemukan ketidakteraturan dalam pelaporan aset, baik dari segi ketepatan waktu maupun kelengkapan data, yang berpotensi mempengaruhi akurasi informasi aset secara keseluruhan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem prosedur dan digitalisasi pengelolaan aset telah berjalan dengan cukup baik, masih diperlukan penguatan kapasitas SDM, pendampingan teknis, serta peningkatan pengawasan pelaporan agar pemanfaatan SIMDA Barang dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Koordinasi dan Kebijakan Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pengelolaan aset kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara telah berjalan melalui mekanisme komunikasi formal dan informal. Koordinasi informal dilakukan dengan memanfaatkan grup WhatsApp yang melibatkan pengelola barang di puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan. Media ini digunakan untuk menyampaikan informasi teknis, klarifikasi data aset, serta pengingat terkait pelaporan. Selain itu, koordinasi formal tetap dilakukan melalui surat resmi sebagai bentuk komunikasi kedinasan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan::

"...koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp pengelola barang puskesmas dan komunikasi resmi..." (Pengurus Barang di Puskesmas, 02/06/2025).

Dari sisi kebijakan institusional, pengelolaan aset kesehatan telah memperoleh dukungan formal melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan pengurus dan penyimpan barang. Keberadaan SK ini memberikan kejelasan mengenai penanggung jawab aset di setiap unit kerja, sekaligus menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset. Hal tersebut ditegaskan oleh informan kunci:

"...diterbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh Bupati..." (Kepala Dinas Kesehatan, 02/06/2025).

Meskipun koordinasi dan dukungan kebijakan telah tersedia, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya keterbatasan pada aspek kebijakan teknis. Hingga saat ini, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pengelolaan aset kesehatan secara rinci. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama dalam hal mekanisme pelaporan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

"...masih diperlukan SOP khusus pengelolaan aset kesehatan agar pelaporan tidak membingungkan..." (Pengurus Barang, 02/06/2025).

Tantangan Teknis dan Administratif

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan aset kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Salah satu tantangan utama adalah jumlah data aset yang sangat besar dan beragam, sehingga membutuhkan proses pengelompokan yang cermat berdasarkan jenis aset serta penilaian kondisi sebelum dilakukan pelaporan. Kondisi ini diakui oleh pengurus barang yang menyatakan bahwa:

"...perlu pengelompokan jenis aset dan penilaian kondisi sebelum dilaporkan..." (Pengurus Barang, 02/06/2025).

Selain kompleksitas data, tantangan lain yang menonjol adalah keterbatasan sarana teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Proses administrasi pengelolaan aset masih dinilai rumit dan memerlukan ketelitian tinggi, sementara jumlah tenaga pengelola barang di pustekmas relatif terbatas dan belum seluruhnya memiliki kompetensi teknis yang memadai. Hal ini disampaikan oleh salah satu staf pengurus barang:

"...kendala berupa proses administrasi yang rumit, keterbatasan teknologi, dan jumlah tenaga..." (Staf Pengurus Barang, 02/06/2025).

Dampak dari keterbatasan tersebut terlihat pada ketidaksesuaian antara data fisik aset dengan data yang tercatat dalam sistem, khususnya pada saat dilakukan pemeriksaan atau

audit. Beberapa informan menyebutkan bahwa proses pelaporan asset cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan secara intensif menjelang audit. Selain itu, ditemukan pula kondisi di mana alat kesehatan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, baik karena ketiadaan suku cadang maupun keterbatasan SDM yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan alat tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Puskesmas:

"...pelaporan hanya menjelang audit...beberapa alat tidak digunakan karena kurang SDM..." (Kepala Puskesmas, 02/06/2025).

Strategi dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara telah mulai menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan asset kesehatan. Salah satu strategi utama yang telah dilakukan adalah pembentukan tim inventarisasi asset. Tim ini dibentuk untuk membantu proses pendataan, pengecekan kondisi asset, serta pembagian tugas pengelolaan asset secara lebih terstruktur antar unit kerja. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan:

"... kami membentuk tim inventarisasi untuk membantu pendataan dan pengelolaan asset..." (Pengurus Barang, 02/06/2025).

Pembentukan tim inventarisasi ini dinilai memberikan dampak positif, khususnya dalam penguatan kerja lintas unit dan peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan puskesmas. Dengan adanya pembagian peran yang lebih jelas, proses inventarisasi menjadi lebih terkontrol dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang pengelola barang.

Selain itu, pimpinan Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sistem pengelolaan asset berbasis digital sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa ke depan sistem pengelolaan asset diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi, sebagaimana diungkapkan berikut:

"...ke depan sistem pengelolaan asset...lebih tertib, transparan, dan berbasis digital..." (Kepala Dinas Kesehatan, 02/06/2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan arah kebijakan jangka panjang yang perlu terus dikembangkan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pengelolaan aset kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan aset kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara melibatkan rangkaian proses administratif dan teknis yang kompleks, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga pelaporan dan penghapusan aset. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik bukan hanya masalah administratif semata, tetapi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Setiawan et al., 2025).

Digitalisasi Sistem dan Efisiensi Tata Kelola

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan aplikasi SIMDA Barang memberikan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan aset secara real time, meskipun keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Hal ini paralel dengan temuan dalam literatur pengelolaan aset publik yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dapat meningkatkan visibilitas data, efisiensi operasional, dan akuntabilitas, khususnya ketika sistem terintegrasi dengan basis data aset yang komprehensif (Setiawan et al., 2025).

Digitalisasi bukan sekadar kasus penggunaan aplikasi, melainkan sebuah transformasi tata kelola yang mempengaruhi keseluruhan siklus aset. Sebagaimana dijelaskan oleh studi di Provinsi DKI Jakarta, digitalisasi aset mampu memperkuat transparansi, akurasi data, serta pengawasan internal dan eksternal mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Namun, sebagaimana ditemukan dalam konteks lain, hambatan utama bukan pada teknologi semata, melainkan pada kesiapan institusi dan SDM, seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas pengguna, serta koordinasi antarunit kerja (Komara, 2025).

Tantangan Kapasitas SDM dan Kompleksitas Administratif

Sejalan dengan penelitian lain mengenai pengelolaan aset daerah, keterbatasan SDM dan rumitnya proses administrasi merupakan masalah umum yang menghambat efektivitas pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan aset. Ketidaksesuaian data fisik dan sistem dalam penelitian ini mencerminkan temuan studi evaluasi pengelolaan aset publik yang menyoroti kendala kompetensi, kurangnya dokumentasi yang lengkap, serta tantangan dalam memastikan data aset tetap akurat dan up-to-date ([Usman et al., 2024](#)).

Keterbatasan SDM juga diidentifikasi sebagai penghambat dalam digitalisasi sistem, di mana adaptasi terhadap teknologi baru membutuhkan dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyoroti pentingnya pelatihan TI dan kesiapan staf sebagai bagian dari reformasi administrasi publik digital ([Adlin et al., 2025](#)).

Koordinasi dan Kebijakan Institusional

Koordinasi melalui grup WhatsApp dan komunikasi resmi menunjukkan inovasi lokal dalam mengatasi hambatan birokrasi, sekaligus mencerminkan kebutuhan akan struktur formal dan pedoman operasional. Hal ini menguatkan literatur yang menekankan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan aset bergantung pada kebijakan kelembagaan yang jelas, peraturan teknis yang mendukung, dan dukungan formal (mis., SK pengurus aset) untuk memperjelas tanggung jawab ([Lestariningsih, 2024](#)).

Pentingnya SOP teknis juga tercatat dalam literatur sebagai salah satu strategi untuk menyederhanakan proses inventarisasi dan pelaporan agar tidak hanya bergantung pada peran individual tetapi berjalan konsisten di seluruh unit ([Anik et al., 2025](#)).

Strategi Peningkatan Pengelolaan Aset

Pembentukan tim inventarisasi merupakan strategi penting yang dapat meningkatkan koordinasi dan pembagian tugas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam studi manajemen aset publik yang menekankan peran tim formal dan rencana kerja tertulis untuk mencapai efisiensi serta akurasi data aset ([El Falah et al., 2025](#)).

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa arah kebijakan jangka panjang seperti transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM merupakan

elemen penting yang dibutuhkan dalam menciptakan sistem pengelolaan aset yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan (Setiawan et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengelolaan aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Namun, seperti ditemukan dalam studi akademik lainnya, keberhasilan implementasi tergantung pada kesiapan SDM, integrasi sistem informasi yang komprehensif, kebijakan kelembagaan yang jelas, dan koordinasi lintas unit kerja. Rekomendasi strategis seperti peningkatan pelatihan SDM, penyusunan SOP teknis, dan pengembangan sistem digital terintegrasi sangat relevan dan didukung oleh literatur akademik terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Darmansyah, R., & Rizki, N. (2025). Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru Melalui Aplikasi LAKSAMANA (Lintas Aplikasi Data Manajemen Aset). *SIMBOL: Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 4(1), 55–63. <https://www.ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/SIMBOL/article/view/183>
- Anik, K., Natsir, M., & Sulistyowati, A. (2025). Evaluasi Penerapan Aplikasi SIASAD dalam Mendukung Inventarisasi Aset Daerah Kota Probolinggo. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 8(3), 331–342. <https://doi.org/10.37504/map.v8i3.745>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
https://books.google.co.id/books/about/Principles_of_Biomedical_Ethics.html?id=_14H7MOw1o4C&redir_esc=y
- BPK. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024*. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf>
- El Falah, H. N., Widianingsih, I., & Afrilia, U. A. (2025). Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel melalui Implementasi Inventarisasi di Dinas Komunikasi dan INnformatika Provinsi Jawa Barat. *Responsive*, 8(3), 441–451. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.64180>

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>

Komara, S. R. (2025). Reformasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Upaya Digitalisasi di Wilayah DKI Jakarta. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 172–178. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/65606>

Lestariningsih, W. S. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 9(2), 119–133. <https://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn/article/view/500>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications Ltd. https://books.google.co.id/books?id=2oA9aWINeooC&printsec=frontcover&hl=id#v=o_nepage&q&f=false

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAQBAJ&>

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208343/metodologi-penelitian-kualitatif>

Setiawan, A., Arevin, A. T., & Syavardie, Y. (2025). Optimizing Public Asset Management through Digital Integration, Accountability, and Sustainable Local Government Policies. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 5(3), 831–843. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/armada/article/view/5305/>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=24>

Tangdilassu, H., Morasa, J., & Kapojos, P. (2023). Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 118–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/51213>

Usman, J., Layuk, P. A., & Kambuaya, M. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset (AAA)*, 7(2), 16–27. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/4647>